

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tebing Tinggi, 24 Februari 2023

**INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI**



**H. KAMLAN, SH, MM, CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650603 198602 1 004



# LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI

2022

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022 ini adalah sebagai wujud kepatuhan Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut di atas, setiap Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri.

Disamping itu pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*Government by Result Oriented*). Kami berharap Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022, dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Semoga Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi ini secara objektif dapat menjadi media penilaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, februari 2023

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI**



**Dra. SRI WAHYUNI, M.Si**  
**NIP. 19640626 199007 2 001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	1
1.3 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama .....	3
1.4 Landasan Hukum.....	3
1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis.....	6
2.1.1 Visi Kepala Daerah.....	6
2.1.2 Misi Kepala Daerah .....	6
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	7
2.3 Penjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	7
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	13
3.2 Realisasi Anggaran .....	15
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	19
<b>BAB IV PENUTUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Tahun 2022 diharapkan dapat:

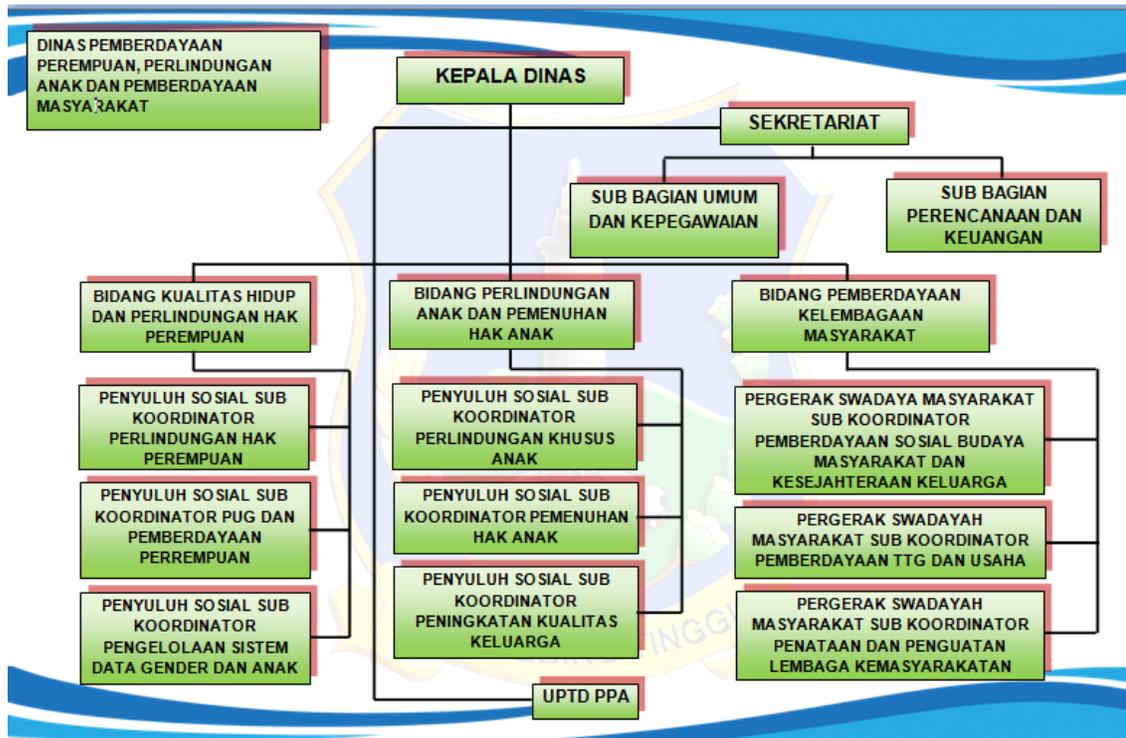
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi.
2. Mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

### **1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tebing Tinggi dibentuk berdasarkan Perda Kota Tebing Tinggi No.2 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Tebing tinggi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi , Tata Kerja Dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi. Artinya DP3APM merupakan OPD yang baru terbentuk di tahun 2021 yang sebelumnya berasal dari DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan). DP3APM ini membidangi 2 (dua) urusan yaitu : urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Struktur DP3APM ini terbentuk dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 050/3708/Tahun 2020.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



### Tugas dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tebing tinggi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi , Tata Kerja Dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Untuk tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi menyelenggarakan fungsi sesuai dengan **Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021** Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, bahwa Kepala Dinas P3APM mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat serta menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. pelaksanaan kebijakan di Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama**

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan dan berjenjang. Untuk mencapai proses tersebut diperlukan Agent of Change (Agen Perubahan) yaitu kader kader pemberdayaan masyarakat yang sudah terbentuk berdasarkan kearifan lokal.

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi dalam menangani urusan pemberdayaan perempuan, anak dan masyarakat terdiri dari isu – isu eksternal dan internal . Isu isu strategis yang berasal dari eksternal adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesetaraan dan keadilan gender di tengah-tengah lingkungan masyarakat.
2. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat .
3. Masih kurangnya partisipasi maupun swadaya masyarakat untuk membangun kelurahan.

Sedangkan isu-isu strategis yang berasal dari internal OPD adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya personil atau SDM DP3APM untuk menyelesaikan tugas-tugas di lapangan bidang Perempuan, Anak dan Masyarakat hampir di setiap seksi tidak ada staf/pelaksana ASN yang ditempatkan.
2. Masih minimnya anggaran untuk dapat melakukan tugas-tugas melayani masyarakat misalnya masih minimnya sarana dan prasarana kantor, atau pun anggaran untuk dapat melibatkan masyarakat agar dapat berperan aktif untuk membangun kelurahannya.

### **1.4 Landasan Hukum**

1. PermenpanRB no 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

### **1.3. Sistematika**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DP3APM Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan Walikota Tebing Tinggi. Sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Tebing Tinggi Periode 2017-2022 adalah “Menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang cerdas, layak, mandiri dan sejahtera dengan sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas”.

##### **2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi dan misi Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang dialirkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

###### **VISI**

Menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang cerdas, layak, mandiri dan sejahtera dengan sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas

###### **MISI**

1. Mewujudkan Tata kelola Pemerintah Tebing Tinggi Yang Baik
2. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Pusat Kegiatan wilayah dan Perdagangan
3. Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan

##### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi pada tujuan yang telah ditetapkan, maka Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Perempuan, Anak dan Masyarakat	1.1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan, Kualitas dan Kelangsungan Hidup	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	-	8,75 Angka	7,05 Angka
				Persentase kelurahan layak anak	-	-	-	28%	51,42%
		1.2	Meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan Yang Aktif	80%	85%	90%	95%	100%

## 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan sama dengan target yang ada dalam dokumen Rencana Strategis DP3APM, untuk mencapai tujuan dan sasaran DP3APM, maka perlu ditetapkan target dari indikator yang telah disusun dari 2 (dua) sasaran yang dituangkan dalam rencana kerja.

## 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

**Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Tujuan</b> : Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan, Anak dan Masyarakat			
2	<b>Sasaran I</b> : Meningkatkan kesetaraan gender, keberdayaan perempuan dan terlindunginya anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka	7,05
		Persentase kelurahan layak anak	Persen	51,42
3	<b>Sasaran II</b> : Meningkatkan kualitas keberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan Yang Aktif	persen	100

**Tabel 4 Program dan Kegiatan**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG</b>	<b>95%</b>	<b>47.728.000</b>
2	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>41 Dokumen</b>	<b>32.206.800</b>
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 OPD	32.206.800
4	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>15.521.200</b>
5	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.521.200
6	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Cakupan penanganan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti</b>	<b>98%</b>	<b>196.171.100</b>
7	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>58.615.200</b>
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	45.045.000
9	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	32 OPD	13.570.200
10	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>28 Orang</b>	<b>137.555.900</b>
11	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	85%	33.875.900
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	3 Layanan	103.680.000

	Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota		
13	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase kelurahan yang aktif di PUSPAGA</b>	<b>60%</b>	<b>26.041.000</b>
14	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>26.041.000</b>
15	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	32 OPD	26.041.000
16	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase lembaga/instansi melaksanakan data terpilah gender dan anak</b>	<b>85%</b>	<b>7.294.900</b>
17	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>29 Dokumen</b>	<b>7.294.900</b>
18	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	9 Dokumen	7.294.900
19	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase Kelembagaan Forum Anak</b>	<b>20%</b>	<b>47.453.000</b>
20	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>47.453.000</b>
21	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	14 Organisasi	47.453.000
22	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase kelurahan yang Responsif terhadap perlindungan anak</b>	<b>51,42%</b>	<b>325.275.000</b>
23	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah dokumen kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>67.905.000</b>
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Dokumen	67.905.000
25	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>180.564.000</b>
26	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Orang	22.200.000

27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	158.364.000
28	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Dokumen hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>76.806.000</b>
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	76.806.000
30	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Layanan Urusan OPD</b>	<b>100%</b>	<b>3.272.979.304</b>
31	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>23.492.000</b>
32	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.262.000
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	15.230.000
34	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan OPD</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>2.629.309.000</b>
35	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	2.629.309.000
36	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Umum OPD</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>259.628.000</b>
37	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	19.093.500
38	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.826.600
39	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.638.100
40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4.981.800
41	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	163.088.000
42	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Kota</b>	<b>100%</b>	<b>301.226.024</b>
43	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	132.434.400
44	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	26.625.600
45	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan	58.532.924

	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
46	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	180 Laporan	83.633.100
47	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>59.324.280</b>
48	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	26.280.000
49	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2.043.200
50	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2.043.200
51	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.006.080
52	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>14.896.300</b>
53	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang diberdayakan</b>	<b>35 Dokumen</b>	14.896.300
54	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	35 Dokumen	14.896.300
55	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat</b>	<b>100%</b>	<b>1.458.977.405</b>
56	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang diberdayakan</b>	<b>544 Lembaga</b>	<b>1.458.977.405</b>
57	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	499 Lembaga	15.959.300
58	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	318 Unit	1.169.125.505
59	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam	3 Laporan	64.531.600

	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
60	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15 Dokumen	209.361.000

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud pertanggung jawaban kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam bentuk laporan. Laporan ini menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan instansi yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*Performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Penjelasan dari capaian indikator kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak berasal dari formula perhitungan Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dibagi jumlah Perempuan dan Anak X 10.000. Pada tahun 2022 realisasi rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 7,6 Angka dari target yang ditetapkan sebesar 7,05 Angka atau 107,8%, sehingga realisasi rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak melebihi target yang ditetapkan karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat di Kota Tebing Tinggi. Data ini diperoleh dari data aplikasi simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
2. Persentase kelurahan layak anak berasal dari formula perhitungan Jumlah Kelurahan Layak Anak dibagi Jumlah Kelurahan yang ada X 100%. Pada tahun 2022 realisasi persentase kelurahan layak anak sebesar 91,42% dari target yang ditetapkan sebesar 51,42% atau 177%, kategori Kelurahan layak anak ini diperoleh dari forum anak dan Aktivis PATBM. Target Kelurahan layak anak yang aktif di kota tebing tinggi sebesar 18 kelurahan dengan realisasi sebesar 32 kelurahan sehingga terget yang ditetapkan mencapai 177% hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh Kelurahan sudah memiliki forum anak dan Aktivis PATBM.
3. Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif dari formula perhitungan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Dibina X 100%. Pada Tahun 2022 realisasi persentase lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang Aktif sebesar 93,32% dari target 100% atau 93,32%, realsiai ini kita dapat dari rekapitulasi kelembagaan masyarakat se Kota Tebing Tinggi tahun 2022, dari data ini jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif sebesar 475 yang bersasal dari Posyantek kecamatan (4), Posyantek Kelurahan (9), Usaha Kelompok Masyarakat (4), Kepling (179), Posyandu (128), Pokjanal Posyandu Kecamatan (5), Pokjanal

Posyandu Kelurahan 935), LPM (35), Kader Pembangunan Manusia (35), TP.PKK Kota (1), TP. PKK Kecamatan (5), TP. PKK Kelurahan (35) Sedangkan jumlah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dibina sebesar 509 yang bersal dari Posyantek Kecamatan (5), Posyantek Kelurahan (35), Usaha Kelompok Masyarakat (11), Kepling (179), Posyandu (128), Pokjnal Posyandu Kecamatan (5), Pokjnal Posyandu Kelurahan (35), LPM (35), Kader Pembangunan Manusia (35), TP.PKK Kota (1), TP. PKK Kecamatan (5), TP. PKK Kelurahan (35).

**Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Kesejahteraan Perempuan, Anak dan Masyarakat						
2	<b>Sasaran I :</b> Meningkatnya kesetaraan gender, keberdayaan perempuan dan terlindunginya anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	7,05 Angka	7,6 Angka	107,8%	Baik	Bidang PP dan PA
		Persentase kelurahan layak anak	51,42%	91,42%	177%	Baik	Bidang PA
3	<b>Sasaran II :</b> Meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan Yang Aktif	100%	93,32%	93,32%	Baik	Bidang Pemkel

**Tabel 5 Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Kesejahteraan Perempuan, Anak dan Masyarakat							
2	<b>Sasaran I :</b> Meningkatnya kesetaraan gender, keberdayaan perempuan dan terlindunginya anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	8,75 Angka	5,2 Angka	140,5 angka	7,05 Angka	7,6 Angka	107,8%
		Persentase kelurahan layak anak	28%	25,72%	91,82%	51,42%	91,42%	177%
3	<b>Sasaran II :</b> Meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan Yang Aktif	95%	87,13%	91,71%	100%	93,32%	93,32%

**Tabel 6 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dibanding kandungan RPJMD**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir RPJMD 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
1	<b>Tujuan</b> : Meningkatnya Kesejahteraan Perempuan, Anak dan Masyarakat				
2	<b>Sasaran I</b> : Meningkatnya kesetaraan gender, keberdayaan perempuan dan terlindunginya anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	7,05 Angka	7,05 Angka	100%
		Persentase kelurahan layak anak	51,42%	51,42%	100%
3	<b>Sasaran II</b> : Meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan Yang Aktif	100%	100%	100%

**Tabel 7 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikato Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
1	<b>Tujuan</b> : Meningkatnya Kesejahteraan Perempuan, Anak dan Masyarakat				
2	<b>Sasaran I</b> : Meningkatnya kesetaraan gender, keberdayaan perempuan dan terlindunginya anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	7,6 Angka	Belum release	
		Persentase kelurahan layak anak	51,42%	Tidak ada	
3	<b>Sasaran II</b> : Meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan Yang Aktif	93,32%	Tidak ada	

**Tabel 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	<b>Tujuan</b> : Meningkatnya Kesejahteraan Perempuan, Anak dan Masyarakat						
2	<b>Sasaran I</b> : Meningkatnya kesetaraan gender, keberdayaan perempuan dan terlindunginya anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	7,05 Angka	7,6 Angka	107,8%	Sosialisasi dan pembinaan terhadap perempuan dan anak	Sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan
		Persentase kelurahan layak anak	51,42%	91,42%	177%		
3	<b>Sasaran II</b> : Meningkatnya	Persentase lembaga	100%	93,32%	93,32%	Pembinaan terhadap	Pembinaan

	kualitas keberdayaan masyarakat kelurahan	kemasyarakatan kelurahan Yang Aktif				kader atau pengurus Lembaga kemasyarakatan kelurahan	yang berkelanjutan
--	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--------------------

**Tabel 9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Kesejahteraan Perempuan, Anak dan Masyarakat						
2	<b>Sasaran I :</b> Meningkatnya kesetaraan gender, keberdayaan perempuan dan terlindunginya anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	107,8%	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan penanganan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	100%	Menunjang
				Program Perlindungan khusus Anak	Persentase kelurahan yang Responsif terhadap perlindungan anak	100%	Menunjang
		Persentase kelurahan layak anak	177%	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kelembagaan Forum Anak	100%	Menunjang
3	<b>Sasaran II :</b> Meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan Yang Aktif	93,32%	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan hukum masyarakat hukum adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat	100%	Menunjang
				Program administrasi pemerintahan desa	Persentase pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan	100%	Menunjang

### 3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 10 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	47.728.000	39.749.000	83.28%
2	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan</b>	32.206.800	24.927.800	77.40%

	Kabupaten/Kota			
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	32.206.800	24.927.800	77.40%
4	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>15.521.200</b>	<b>14,821,200</b>	<b>95.49%</b>
5	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	15.521.200	14,821,200	95.49%
6	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>196.171.100</b>	<b>90.983.500</b>	<b>46,38%</b>
7	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>58.615.200</b>	<b>58.615.200</b>	<b>100.00%</b>
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.045.000	45,045,000	100.00%
9	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	13.570.200	13,570,200	100.00%
10	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>137.555.900</b>	<b>32.368.300</b>	<b>23,53%</b>
11	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	33.875.900	31,568,300	93.19%
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	103.680.000	800,000	0.77%
13	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>26.041.000</b>	<b>22,409,000</b>	<b>86,05%</b>
14	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>26.041.000</b>	<b>22,409,000</b>	<b>86.05%</b>
15	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26.041.000	22,409,000	86.05%
16	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>7.294.900</b>	<b>7,284,900</b>	<b>99.86%</b>
17	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.294.900</b>	<b>7,284,900</b>	<b>99.86%</b>
18	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	7.294.900	7,284,900	99.86%
19	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>47.453.000</b>	<b>39,491,300</b>	<b>83.22%</b>
20	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>47.453.000</b>	<b>39,491,300</b>	<b>83.22%</b>
21	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	47.453.000	39,491,300	83.22%

	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
22	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>325.275.000</b>	<b>220.325.600</b>	<b>67,73%</b>
23	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>67.905.000</b>	<b>67,554,600</b>	<b>99.48%</b>
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	67.905.000	67,554,600	99.48%
25	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>180.564.000</b>	<b>77.165.000</b>	<b>42,73</b>
26	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.200.000	22,200,000	100.00%
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	158.364.000	54,965,000	34.71%
28	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>76.806.000</b>	<b>75,606,000</b>	<b>98,43%</b>
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000	75,606,000	98.44%
30	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.272.979.304</b>	<b>3.184.979.764</b>	<b>97,31%</b>
31	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.492.000</b>	<b>23.464.000</b>	<b>99,90%</b>
32	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.262.000	8,247,000	99.82%
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.230.000	15,217,000	99.91%
34	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.629.309.000</b>	<b>2,551,244,949</b>	<b>97.03%</b>
35	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.629.309.000	2,551,244,949	97.03%
36	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>259.628.000</b>	<b>259.431.785</b>	<b>100%</b>
37	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.093.500	19,093,500	100.00%
38	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.826.600	51,826,200	100.00%
39	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.638.100	20,638,000	100.00%
40	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.981.800	4,981,800	100.00%
41	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.088.000	162,892,285	99.88%
42	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>301.226.024</b>	<b>293.176.293</b>	<b>97,32%</b>

43	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132.434.400	127,434,777	96.22%
44	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.625.600	25,356,036	95.23%
45	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.532.924	56,882,060	97.18%
46	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.633.100	83,503,420	99.84%
47	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>59.324.280</b>	<b>57.659.737</b>	<b>97,19%</b>
48	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.280.000	24,666,075	93.86%
49	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.043.200	2,043,200	100.00%
50	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.043.200	24,960,000	99.86%
51	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.006.080	5,990,462	99.74%
52	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>14.896.300</b>	<b>14,396,300</b>	<b>96.64%</b>
53	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>14.896.300</b>	<b>14,396,300</b>	<b>96.64%</b>
54	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	14.896.300	14,396,300	96.64%
55	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>1.458.977.405</b>	<b>1.241.701.715</b>	<b>85,11%</b>
56	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.458.977.405</b>	<b>1.241.701.715</b>	<b>85,11%</b>
57	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15.959.300	15,959,300	100.00%
58	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.169.125.505	957,490,615	81.90%
59	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	64.531.600	59,531,600	92.25%
60	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	209.361.000	208,720,200	99.69%

### 3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.02/2017 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi  
 PAK<sub>i</sub> : Pagu anggaran keluaran i  
 RAK<sub>i</sub> : Realisasi anggaran keluaran i  
 CK<sub>i</sub> : Capaian keluaran i

PAGU ANGGARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KELUARAN	REALISASI ANGGARAN
5.396.816.009	100	100	1	4.861.318.079

{(PAGU ANGGARAN X CAPAIAN KELUARAN) - REALISASI ANGGARAN}	(PAGU ANGGARAN X CAPAIAN KELUARAN)	TINGKAT EFISIENSI
535.497.930	5.396.816.009	9,92

Dari perhitungan diatas tingkat efisiensi dari pencapaian target kinerja DPPAPM bila dibandingkan dengan pagu anggaran adalah sebesar 9,92%

**Tabel 11 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Perempuan, Anak dan Masyarakat								
2	Sasaran I : Meningkatnya kesetaraan gender, keberdayaan perempuan dan terlindunginya anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	7,05 Angka	7,6 Angka	107,8%	521.446.100	331.309.100	63,54%	
		Persentase kelurahan layak anak	51,42%	91,42%	177%	47.453.000	39.491.300	83,22%	

3	<b>Sasaran II :</b> Meningkatnya kualitas keberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan Yang Aktif	100%	93,32%	93,32%	1.473.872.705	1.256.098.015	85,22%	
---	---	--	------	--------	--------	---------------	---------------	--------	--

**Tabel 12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	95%	95%	100%	47.728.000	39.749.000	83.28%	
2	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	41 Dokumen	41 Dokumen	100%	32.206.800	24.927.800	77.40%	
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	32 OPD	32 OPD	100%	32.206.800	24.927.800	77.40%	
4	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	15.521.200	14,821,200	95.49%	
5	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	15.521.200	14,821,200	95.49%	
6	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	98%	98%	100%	196.171.100	90.983.500	46,38%	
7	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	58.615.200	58.615.200	100.00%	
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	44 Dokumen	44 Dokumen	100%	45.045.000	45,045,000	100.00%	
9	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	32 OPD	32 OPD	100%	13.570.200	13,570,200	100.00%	
10	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	3 Layanan	3 Layanan	100%	137.555.900	32.368.300	23,53%	

11	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	28 Orang	100%	33.875.900	31,568,300	93.19%	
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	3 Layanan	100%	103.680.000	800,000	0.77%	
13	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>100%</b>	<b>26.041.000</b>	<b>22,409,000</b>	<b>86,05%</b>	
14	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>26.041.000</b>	<b>22,409,000</b>	<b>86.05%</b>	
15	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	32 OPD	32 OPD	100%	26.041.000	22,409,000	86.05%	
16	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	<b>7.294.900</b>	<b>7,284,900</b>	<b>99.86%</b>	
17	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>29 Dokumen</b>	<b>29 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>7.294.900</b>	<b>7,284,900</b>	<b>99.86%</b>	
18	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	7.294.900	7,284,900	99.86%	
19	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	<b>47.453.000</b>	<b>39,491,300</b>	<b>83.22%</b>	
20	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>47.453.000</b>	<b>39,491,300</b>	<b>83.22%</b>	
21	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Organisasi	14 Organisasi	100%	47.453.000	39,491,300	83.22%	
22	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>51,42%</b>	<b>51,42%</b>	<b>100%</b>	<b>325.275.000</b>	<b>220.325.600</b>	<b>67,73%</b>	
23	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>14 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>67.905.000</b>	<b>67,554,600</b>	<b>99.48%</b>	

24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	67.905.000	67,554,600	99.48%	
25	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>3 Layanan</b>	<b>100%</b>	<b>180.564.000</b>	<b>77.165.000</b>	<b>42,73</b>	
26	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43 Orang	43 Orang	100%	22.200.000	22,200,000	100.00%	
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	3 Layanan	100%	158.364.000	54,965,000	34.71%	
28	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>76.806.000</b>	<b>75,606,000</b>	<b>98,43%</b>	
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	76.806.000	75,606,000	98.44%	
30	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.272.979.304</b>	<b>3.184.979.764</b>	<b>97,31%</b>	
31	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>100%</b>	<b>23.492.000</b>	<b>23.464.000</b>	<b>99,90%</b>	
32	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	8.262.000	8,247,000	99.82%	
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%	15.230.000	15,217,000	99.91%	
34	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100%</b>	<b>2.629.309.000</b>	<b>2,551,244,949</b>	<b>97.03%</b>	
35	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4 Paket	4 Paket	100%	2.629.309.000	2,551,244,949	97.03%	
36	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100%</b>	<b>259.628.000</b>	<b>259.431.785</b>	<b>100%</b>	

37	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	100%	19.093.500	19,093,500	100.00%	
38	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	51.826.600	51,826,200	100.00%	
39	Penyediaan Bahan Logistik Kantor100%	1 Paket	1 Paket	100%	20.638.100	20,638,000	100.00%	
40	Penyediaan Barang 100%Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	100%	4.981.800	4,981,800	100.00%	
41	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	100%	163.088.000	162,892,285	99.88%	
42	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>301.226.024</b>	<b>293.176.293</b>	<b>97,32%</b>	
43	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	132.434.400	127,434,777	96.22%	
44	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	36 Laporan	100%	26.625.600	25,356,036	95.23%	
45	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	58.532.924	56,882,060	97.18%	
46	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180 Laporan	180 Laporan	100%	83.633.100	83,503,420	99.84%	
47	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>59.324.280</b>	<b>57.659.737</b>	<b>97,19%</b>	
48	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	100%	26.280.000	24,666,075	93.86%	
49	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%	2.043.200	2,043,200	100.00%	
50	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	100%	2.043.200	24,960,000	99.86%	
51	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	100%	6.006.080	5,990,462	99.74%	
52	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>14.896.300</b>	<b>14,396,300</b>	<b>96.64%</b>	
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>35 Dokumen</b>	<b>35 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>14.896.300</b>	<b>14,396,300</b>	<b>96.64%</b>	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	35 Dokumen	35 Dokumen	100%	14.896.300	14,396,300	96.64%	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100%</b>	<b>1.458.977.405</b>	<b>1.241.701.715</b>	<b>85,11%</b>	

	<b>KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>							
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>544 Lembaga</b>	<b>544 Lembaga</b>	<b>100%</b>	<b>1.458.977.405</b>	<b>1.241.701.715</b>	<b>85,11%</b>	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	499 Lembaga	499 Lembaga	100%	15.959.300	15,959,300	100.00%	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	318 Unit	318 Unit	100%	1.169.125.505	957,490,615	81.90%	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan	100%	64.531.600	59,531,600	92.25%	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	209.361.000	208,720,200	99.69%	

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Sepanjang tahun 2022 ini, beberapa keberhasilan maupun ketidakberhasilan telah dicapai oleh DP3APM Kota Tebing Tinggi. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis ke 2 (dua) sasaran dengan ke 3 (tiga) indikator realisasi kinerja rata-rata sudah hampir atau mencapai target yang diinginkan dan terealisasi 100%
2. Realisasi kinerja DP3APM rata-rata telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2022.
3. Secara umum pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja yaitu sebagai berikut :
  - b. Keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan yang mendukung kinerja
  - c. Keterbatasan anggaran untuk dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak

Langkah langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Mengajukan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan peralatan untuk menunjang kelancaran kinerja
- b. Mengusulkan pengajuan anggaran untuk melakukan sosialisasi ataupun pembinaan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tebing Tinggi, Februari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI**



**Dra. SRI WAHYUNI, M.Si  
NIP. 19640626 199007 2 001**